

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Arba, 2018. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafiks

Dr. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum.

Djamanat Samosir, 2011, Hukum Acara Perdata : Tahap-tahap Penyelesaian
Perkara Perdata, Nuansa Aulia, Bandung, Rento Wulan Sutantio, 2009,
Hukum Acara Perdata, CV Mandar Maju, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

H. Riduan Syahrani, sistem peradilan dan hukum acara perdata di Indonesia

Isnaeni, D. Suratman, H. Reforma Agraria

J. Satrio, 1993, Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung.

-R. Subekti, 2014, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermedia,

Syah, M.I. 2018. Panduan Mengurus Sertifikat Dan Penyelesaian Sengketa Tanah

Subekti, 1979 Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermedia

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6,
Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1982, Op, Cit., Lihat Juga: Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Op,cit; Subekti, 1982, Op. Cit., Taufik Makarao, 2004, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Hukum Acara Perdata Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :Rajawali Pers.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung, Pustaka Setia.

Waskito. Arnowo,H.2017.PenyelenggaraanPendaftaran Tanah Di Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1967 Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. V, (Bandung: Sumur Bandung,

Yos Rama, 2018 Hukum Acara Perdata FH UndanaKupang

Yahya Harahap. 2016 Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA) (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) jo (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Nomor 4358).

Jurnal

Mardani, 2015, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan ke-2.

Hajar M, 2007, Hukum Kewarisan Islam, Pekanbaru : Alaf Riau, cet. Pertama.

Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertahanan*, Pustaka Margaretha, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

R Setiawan, 1982, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1967, Perbuatan Melawan Hukum, Cet. V, Sumur Bandung, Bandung.

Amrizal J. Prang, Jurnal Transformasi, Volumw 3, Nomor 2, Tahun 2013.

Rachamadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, PT Itra Aditya Bakti, Bandung.

Deasy Soikromo, Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan.

Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Penerbit : PT . Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Pengetahuan Hukum Acara Perdata Dan Permasalahan di Indonesia, Istilah-istilah

Pihak Dalam Gugatan Perdata.

Thomas Chandra. Pihak Intervensi Dalam Hukum Acara Perdata.

Renglement Op de Burgerlijke Recht Vordering. (RV) (S. 1847 No. 52 jo. S. 1849
No. 43);

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No.
23);

Huwelijks Ordonantie voor Charisten Indoneesiërs, (S. 1933 No. 74, S. 1936 No.
607);

Mahkamah Agung RI, 2008, Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata
Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 Tahun 1964 tertanggal 13
April 1964.

Herziene Inlandsch Renglement (HIR)

Rechtsreglement voor de Buitengewest (RBg)

Riawan Tjandra W., dan H. Chandra., 2001, Pengantar Praktis Penanganan
Perkara Perdata Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum,
Pustaka Kartini, Jakarta.

Subekti 1991, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta,. Lihat juga :
Soepomo, 2010, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita,
Jakarta.

Subekti, 1982, Op, Cit., hlm. 89. Lihat Juga: Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Idem; Subekti, Op. Cit., Hukum Acara Perdata.

I NJ, HR 3 April 1890, W 5856; P.T. Bandung 24 Juni 1971 No. 285/1969 dalam Ibid.,

Roihan A. Rasyid, 2006, Hukum Acara Peradilan Agama, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjokoro, Op. Cit.

Website

<https://kbbi.web.id/sidang>

Putusan

Putusan No : 85/Pdt.G/2010/PN.Kpg.

Putusan No : 69/PDT/2012/PTK

Putusan No : 2503 K/Pdt/2013

Putusan No : 551 PK/Pdt/2017